

Peran Pembelajaran PPKn dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara

Ni Kadek Deby Dwi Payani¹, I Wayan Lasmawan², I Nengah Suastika³, Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami⁴, Ni Nyoman Asri Sidaryanti⁵

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha

Email: Deby.dwi@student.undiksha.ac.id

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) memainkan peran penting dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Sebagai bagian dari sistem pendidikan, PPKn bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan tanggung jawab sosial pada siswa. Di era globalisasi yang penuh dengan tantangan sosial dan politik, pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban warga negara menjadi semakin penting agar individu dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Penelitian ini berfokus pada penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh landasan teoretis dan konseptual mengenai pembelajaran PPKn serta pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai konsep, teori, dan temuan penelitian terdahulu tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 7 tentang hak dan kewajiban warga negara. Melalui pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan berorientasi pada nilai, siswa tidak hanya mampu memahami konsep hak dan kewajiban secara teoritis, tetapi juga dapat mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari

Kata Kunci: *PPKn, Hak, Kewajiban*

PENDAHULUAN

Di tengah dinamika kehidupan nasional yang semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi, terdapat harapan besar bahwa sistem pendidikan nasional mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga matang dalam karakter, moralitas, dan kesadaran (Putri, 2024). Harapan ini semakin diperkuat oleh realitas sosial yang menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat terhadap individualisme, toleransi sosial yang rendah, partisipasi warga yang lemah dalam kehidupan demokrasi, dan menurunnya kepedulian terhadap tanggung jawab sosial (Susilawati, 2025).

Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang posisi yang sangat strategis sebagai mata pelajaran yang tidak hanya berfungsi untuk mentransfer pengetahuan tentang sistem politik dan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai wahana utama untuk pembentukan nilai-nilai, sikap, dan perilaku kewarganegaraan yang baik (Surata et al., 2025). Pendidikan kewarganegaraan diharapkan menjadi landasan utama untuk mengembangkan generasi muda yang sepenuhnya menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, dan mampu memainkan peran aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan nasional secara bertanggung jawab, kritis, dan konstruktif (Suheti, 2025).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran penting dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Sebagai bagian dari sistem

pendidikan, PKn bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan tanggung jawab sosial pada siswa. Di era globalisasi yang penuh dengan tantangan sosial dan politik, pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban warga negara menjadi semakin penting agar individu dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Noviani & Muthi, 2025). Namun, dalam praktiknya, pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban mereka masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurikulum yang tidak relevan, metode pembelajaran yang kurang menarik, dan minimnya praktik kehidupan nyata (Mangalik & Apriliayana, 2024). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Pendidikan merupakan sarana utama dalam membentuk karakter dan pengetahuan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter kewarganegaraan adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) (Permana & Bahari, 2025). Melalui pembelajaran PPKn, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang sistem kenegaraan, tetapi juga dibekali nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, PPKn memiliki fungsi penting dalam menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara sejak usia sekolah.

Hak dan kewajiban warga negara merupakan materi pokok dalam pembelajaran PPKn, karena berkaitan langsung dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban menjadi landasan bagi siswa untuk bersikap adil, bertanggung jawab, serta menghargai hak orang lain. Tanpa pemahaman yang baik, siswa cenderung hanya menuntut hak tanpa menyadari kewajibannya, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perilaku sosial mereka di lingkungan sekolah maupun masyarakat (Basri, 2023). Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, khususnya kelas VII, siswa berada pada tahap perkembangan kognitif dan sosial yang mulai mampu memahami konsep-konsep abstrak seperti norma, hukum, serta peran sebagai warga negara. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan siswa yang kurang memahami makna hak dan kewajiban secara utuh. Hal ini terlihat dari perilaku yang kurang disiplin, rendahnya tanggung jawab terhadap tugas, serta kurangnya kesadaran dalam menaati aturan sekolah.

Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya pemahaman siswa adalah proses pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan berpusat pada guru. Metode ceramah yang dominan membuat siswa cenderung pasif dan kurang terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran (Estuningsih et al., 2025). Akibatnya, materi tentang hak dan kewajiban hanya dipahami sebatas teori, belum mampu diinternalisasi dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Pembelajaran PPKn seharusnya dilaksanakan secara kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan suasana belajar yang interaktif melalui diskusi, studi kasus, simulasi, maupun pembelajaran berbasis masalah (Setyaningrum & Aini, 2026). Dengan strategi pembelajaran yang tepat, siswa dapat lebih mudah memahami konsep hak dan kewajiban serta mengaitkannya dengan pengalaman nyata di lingkungan mereka.

Peran pembelajaran PPKn dalam meningkatkan pemahaman siswa tidak hanya terletak pada penyampaian materi, tetapi juga pada proses pembentukan sikap kewarganegaraan. Ketika siswa memahami hubungan antara hak dan kewajiban secara seimbang, mereka akan lebih menghargai aturan, bertanggung jawab terhadap tugas, serta menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila (Perwandaka et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan warga negara yang baik (good citizen). Namun demikian, keberhasilan pembelajaran PPKn sangat bergantung pada metode, media, dan pendekatan yang digunakan guru di kelas. Kurangnya inovasi pembelajaran dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengkaji sejauh mana peran pembelajaran PPKn dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara, khususnya pada siswa kelas VII.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peran pembelajaran PPKn dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara menjadi penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pembelajaran PPKn serta menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan bermakna, sehingga tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat tercapai secara optimal.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research). Penelitian ini berfokus pada penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh landasan teoretis dan konseptual mengenai pembelajaran PPKn serta pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai konsep, teori, dan temuan penelitian terdahulu tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang diperoleh dari buku teks PPKn, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel penelitian, prosiding, dokumen kurikulum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, dan dokumentasi literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Kriteria literatur yang digunakan meliputi kesesuaian topik, kredibilitas sumber, serta relevansi dengan konteks pembelajaran PPKn di jenjang SMP, khususnya kelas VII.

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi (content analysis), yaitu mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai konsep serta hasil penelitian yang telah ditemukan. Peneliti mengelompokkan informasi berdasarkan tema seperti peran guru PPKn, strategi pembelajaran, serta indikator pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban warga negara. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan mengenai bagaimana pembelajaran PPKn berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman kewarganegaraan siswa kelas VII.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan adalah proses mengembangkan individu yang berkualitas. Melalui proses alami dan sistematis ini, pendidikan diharapkan menjadi landasan untuk memahami esensi kehidupan yang sebenarnya. Untuk mencapai tujuan ini, pendidikan membutuhkan unsur penting: mata pelajaran (Pardede et al., 2024). Mata pelajaran merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang berbagai ilmu pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan sikap positif sesuai dengan tujuan setiap mata pelajaran. Salah satu mata pelajaran yang termasuk dalam kurikulum pendidikan Indonesia adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) .

Pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata Latin "civicus," yang berarti warga negara, di Yunani kuno. Pemahaman tentang kewarganegaraan ini kemudian disepakati sebagai asal mula "pendidikan kewarganegaraan." Konsep pendidikan kewarganegaraan ini kemudian diadopsi di Indonesia sebagai pendidikan warga negara (Rahmadani et al., 2025). Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang berfokus pada pengembangan karakter sebagai warga negara. Tujuan pendidikan ini adalah untuk menciptakan warga negara Indonesia yang memiliki keterampilan, kecerdasan, dan karakter sesuai dengan Pancasila dan konstitusi (Hosnan, 2022).

Meskipun demikian, tujuan pendidikan di setiap negara adalah sama: untuk mengembangkan warga negara yang baik. Akan tetapi, konsep warga negara yang baik dapat berbeda dari satu negara ke negara lain, seperti halnya di Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (Hamjah et al., 2023). Pendidikan Kewarganegaraan mencakup konsep dan informasi komprehensif tentang warga negara secara kritis dan bertanggung jawab, berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 (Haryono et al., 2024). Pendidikan kewarganegaraan secara khusus berfokus pada pengembangan beberapa aspek penting menjadi warga negara, yaitu pengembangan kompetensi kewarganegaraan, moral kewarganegaraan, serta nilai-nilai dan keyakinan dalam demokrasi (Firnanda et al., 2025). Melalui semua elemen ini, pendidikan menjadi pedoman dalam membentuk karakter warga negara yang berkualitas yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari pendidikan wajib, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Pasal 35 ayat (3) undang-undang tersebut mewajibkan universitas untuk menyediakan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa (Sunarni, 2022). Pasal 35 ayat (3) menjelaskan bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan pendidikan tentang Pancasila, Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa nasionalisme dan cinta tanah air (Simanungkalit et al., 2025).

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian integral dari kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, dan merupakan disiplin ilmu dalam ilmu sosial yang memiliki tujuan khusus, yaitu membentuk dan mengembangkan karakter siswa agar menjadi warga negara yang baik (warga negara yang baik). Fokus utama pendidikan ini adalah pengembangan nilai-nilai, dengan mengajarkan dan mengembangkan moral dan norma kepada siswa, serta melatih mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dalam

konteks bangsa dan negara (Setyaningrum & Aini, 2026). Selain itu, pendidikan ini juga berperan sebagai sarana untuk mengembangkan dan memperkaya nilai-nilai yang berasal dari budaya bangsa Indonesia. Tujuannya adalah agar nilai-nilai luhur bangsa dapat diterapkan secara rasional dalam kehidupan bangsa dan negara, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa warga negara memiliki kemampuan rasional untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional. Menurut Basri (2023), peningkatan partisipasi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab membutuhkan pemahaman ilmu pengetahuan, keterampilan intelektual, dan keterampilan untuk berperan dalam kehidupan nasional dan negara. Sementara itu, Permana & Bahari, (2025) menyatakan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mendorong partisipasi dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik di tingkat lokal, negara bagian, maupun nasional.

Konsep Hak dan Kewajiban

Hak adalah hal-hal yang seharusnya diterima oleh setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita mulai dengan hak-hak yang paling mendasar, seperti hak untuk hidup layak, hak untuk memilih keyakinan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri (Mangalik & Aprilayana, 2024). Semua warga negara dapat menjalankan hak-hak mereka jika terlebih dahulu mereka memenuhi kewajiban mereka semaksimal mungkin. Konsep hak juga telah dikemukakan atau dijelaskan oleh beberapa ahli. Menurut Srijanti, "hak adalah unsur normatif yang mendorong tindakan, melindungi kebebasan, dan menjamin kesempatan bagi orang untuk mempertahankan martabat dan nilai diri." Menurut Notonegoro, hak adalah "hak pihak tertentu untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus diterima atau dilaksanakan dan, pada prinsipnya, tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang mungkin dipaksa untuk melakukannya."

Menurut para ahli, hak dapat didefinisikan sebagai apa yang dibutuhkan seseorang untuk melindungi kesejahteraannya dan untuk menerima atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk mengakses hak-haknya dan secara terbuka mengekspresikan pendapat dan gagasannya sebagai warga negara. Penjelasan ini digunakan untuk menggambarkan pentingnya dan signifikansi hak warga negara Indonesia atas kebebasan berekspresi di tempat umum.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan secara bertanggung jawab. Setiap orang memiliki kewajiban tergantung pada situasi dan kemampuan mereka (Noviani & Muthi, 2025). Misalnya, dalam kehidupan seorang siswa, mereka berkewajiban untuk bersekolah, menyelesaikan tugas, dan mematuhi peraturan sekolah yang berlaku. Tonegoro menjelaskan makna dan pentingnya kewajiban: "Kewajiban adalah menyediakan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan atau diberikan oleh suatu pihak.

Kewajiban bersifat spesifik dan, pada prinsipnya, tidak dapat digantikan oleh pihak lain yang dapat dipaksa untuk menuntut." Menurut kutipan ini, kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap individu, sebagai warga negara, untuk mencapai hak-hak yang

telah mereka peroleh sebagai warga negara. Hal ini sangat penting untuk hak kebebasan berekspresi. Selain hak untuk berekspresi, semua warga negara juga harus memenuhi kewajiban mereka untuk menyampaikan pendapat mereka secara wajar guna menjaga persatuan masyarakat dan mencegah perpecahan di antara mereka (Suheti, 2025). Pernyataan ini digunakan untuk meneliti makna dan batasan hak kebebasan berekspresi di depan umum.

Peran Pembelajaran PPKn Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Pembelajaran PPKn memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban warga negara. Siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan partisipatif memperlihatkan peningkatan kemampuan dalam menjelaskan konsep hak dan kewajiban secara lebih tepat dibandingkan sebelum pembelajaran (Surata et al., 2025). Mereka tidak hanya mampu menyebutkan contoh hak dan kewajiban, tetapi juga memahami keterkaitan antara keduanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penggunaan metode pembelajaran aktif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi peran, berkontribusi besar terhadap peningkatan pemahaman siswa. Melalui metode ini, siswa terlibat langsung dalam proses berpikir kritis dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan situasi nyata, misalnya tentang hak memperoleh pendidikan atau kewajiban menaati peraturan sekolah (Putri, 2024). Keterlibatan aktif tersebut membuat konsep yang dipelajari menjadi lebih bermakna dan tidak sekadar hafalan. Selain itu, peran guru sebagai fasilitator juga menjadi faktor penting (Susilawati, 2025). Guru yang mampu mengaitkan materi PPKn dengan kehidupan sehari-hari siswa membantu mereka melihat relevansi materi dengan realitas sosial. Penjelasan yang disertai contoh konkret, seperti kewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekolah sebagai wujud tanggung jawab warga negara, membuat siswa lebih mudah memahami penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan nyata (Surata et al., 2025).

Adanya perubahan sikap siswa setelah mengikuti pembelajaran PPKn yang efektif. Siswa menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak. Hal ini tercermin dari perilaku yang lebih disiplin, menghargai pendapat teman, serta partisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Dengan demikian, pembelajaran PPKn tidak hanya meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga membentuk sikap dan karakter kewarganegaraan.

KESIMPULAN

Pembelajaran PPKn memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 7 tentang hak dan kewajiban warga negara. Melalui pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan berorientasi pada nilai, siswa tidak hanya mampu memahami konsep hak dan kewajiban secara teoritis, tetapi juga dapat mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran aktif serta peran guru sebagai fasilitator terbukti membantu siswa berpikir kritis, berdiskusi, dan merefleksikan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dampaknya terlihat pada peningkatan pengetahuan, kesadaran, serta sikap positif siswa dalam melaksanakan kewajiban dan menghargai hak orang lain. Dengan demikian,

pembelajaran PPKn menjadi sarana strategis dalam membentuk pemahaman kewarganegaraan yang utuh sekaligus menumbuhkan karakter siswa yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, N. (2023). Meningkatkan Hasil Belajar Pkn Materi Hak Dan Kewajiban Di Sekolah Dengan Menggunakan Metode Pembelajaran Role Playing Siswa Kelas Iii Sd Negeri 26 Kota Ternate. *Jurnal Pendas (Pendidikan Sekolah Dasar)*, 5(1), 54–66.
- Estuningsih, K., Satriyani, D. Y., Arif, S., & Bintoro, Y. A. (2025). Efektivitas Model Pembelajaran Project-Based Learning (Pjbl) Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Motivasi Belajar Siswa Tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia (Wni) Di Sman 21 Surabaya. *Al-Muaddib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(4), 500–514.
- Firnanda, R. N., Hapsari, K. C., Yuliawati, R., & Widodo, S. T. (2025). Implementasi Model Problem Based Learning Dan Cooperative Learning Untuk Meningkatkan Pemahaman Hak Dan Kewajiban Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang*, 11(04), 465–473.
- Hamjah, S. I., Noe, W., & Rajaloe, N. (2023). Peran Pembelajaran Ppkn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peserta Didik Di Kelas Vii Smp Negeri 4 Kota Ternate. *Jambura Journal Civic Education*, 3(2).
- Haryono, O., Firmansyah, Y., & Repelita, T. (2024). Peran Ppkn Sebagai Pendidikan Multikultur Dalam Meningkatkan Toleransi Siswa. *Journal Of Education Research*, 5(2), 2138–2144.
- Hosnan, H. (2022). Peningkatan Kualitas Pembelajaran Ppkn Tema 3 Materi Pelaksanaan Kewajiban, Hak, Dan Tanggung Jawab Sebagai Warga Negara Melalui Pembelajaran Model Quantum Learning Media Flash Card Pada Siswa Kelas Vi. *Jurnal Pembelajaran Dan Riset Pendidikan*, 2(2), 111–117.
- Mangalik, A. D., & Apriliyana, N. P. (2024). Pemahaman Mengenai Hak Dan Kewajiban Pada Mata Pelajaran Pkn Menggunakan Metode Role Playing Pada Siswa Sekolah Dasar Di Kota Tarakan. *Jurnal Pendidikan Dasar Borneo (Judikdas Borneo)*, 6(1), 1–8.
- Noviani, F., & Muthi, I. (2025). Efektivitas Metode Diskusi Kelompok Terhadap Peningkatan Partisipasi Aktif Siswa Pada Materi Hak Dan Kewajiban Dalam Pembelajaran Ppkn Di Sekolah Dasar. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2(3), 272–283.
- Pardede, D. L., Pardede, L., Siahaan, M., Alexander, I. J., & Sirait, G. (2024). Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Hasil Belajar Pkn Siswa Pada Materi Persamaan Kedudukan Warga Negara. *Jurnal Darma Agung*, 32(6), 426–430.
- Permana, Y. D., & Bahari, R. (2025). Optimalisasi Media Menara Papan Cerdas (Marpadas) Pada Materi Hak Dan Kewajiban Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Sekolah Dasarkelas Iv. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 16(1), 1–10.
- Perwandaka, M., Pratama, F. F., & Mahendra, H. H. (2024). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Make A Match Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Hak Dan Kewajiban. *Jipis*, 33(2), 94–109.
- Putri, N. A. (2024). Metode Role Play Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap

- Hak Dan Kewajiban Warga Negara Di Sd. *Jurnal Manajemen Pendidikanmotivasi Dan Bahasa Harapan*, 2(2).
- Rahmadani, R. A., Maharani, D., El-Taura, W. S., & Sari, D. N. (2025). Analisis Modul Ajar Mandiri Ppkn Pada Materi Hak Dan Kewajiban Siswa Kelas Iii. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 225–234.
- Setyaningrum, A. A., & Aini, I. Q. (2026). Meningkatkan Kesadaran Hak Kewajiban Kehidupan Bermasyarakat Melalui Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(1), 1052–1063.
- Simanungkalit, G. C. L., Siregar, S. U., Rajagukguk, M. A., & Simanjorang, G. D. (2025). Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling*, 2(4), 1350–1354.
- Suheti, R. (2025). Strategi Flipped Classroom Dalam Pembelajaran Pkn: Studi Pada Materi Hak Dan Kewajiban Warga Negara. *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences And Humanities*, 3(3), 58–71.
- Sunarni, E. (2022). Peningkatan Kualitas Pembelajaran Ppkn Tema 6 Materi Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Sebagai Warga Negara Melalui Strategi Synergetic Teaching Pada Siswa Kelas V. *Jurnal Pembelajaran Dan Riset Pendidikan*, 2(2), 92–97.
- Surata, I. N., Sanjaya, D. B., & Swastika, N. (2025). Pembelajaran Pkn Berbasis Discovery Learning Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 9(2), 226–233.
- Susilawati, L. P. (2025). Pembelajaran Pkn Berbasis Contextual Teaching And Learning (Ctl) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 9(2), 234–241.